

BAB II NORWEGIA DALAM IMPOR MINYAK SAWIT INDONESIA

Pada bab ini memberikan gambaran mengenai negara negara yang sempat memboikot minyak sawit dari Indonesia, kemudian aktivitas Norwegia dalam impor minyak sawit dan produk olahan berbahan baku minyak sawit dari Indonesia.

2.1. Negara - Negara Penolak Impor Minyak Sawit Indonesia

Pengolahan kelapa sawit di Indonesia oleh beberapa perusahaan sempat dipandang buruk oleh beberapa negara di dunia. Itu mengapa masalah mengimpor produk olahan kelapa sawit sering kali menjadi perdebatan di dunia internasional. Negara negara tersebut diantaranya adalah negara negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Melalui European Commission, negara negara dalam Uni Eropa menyatakan bahwa menolak minyak sawit untuk *biofuel* mulai awal tahun 2021. Hal tersebut didasari oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh European Commission bahwa penggunaan minyak kelapa sawit untuk *biofuel* di saat yang bersamaan telah meningkatkan deforestasi dan gas emisi (Rainforest Norway; Transport & Environment, 2019).

Pemerintah Indonesia sempat dinilai tidak serius dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan hal ini tentunya membuka peluang bagi perusahaan perusahaan kelapa sawit untuk secara sengaja atau tidak merusak kelestarian dan biodiversitas hutan. Pemerintah Indonesia pernah berargumen bahwa hutan Indonesia seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal ini menunjang kesejahteraan petani lokal (Larsen, 2014).

Di sisi lain, masyarakat Indonesia banyak yang setuju dan mendukung pandangan dari Uni Eropa, hingga mendorong reformasi kebijakan penggunaan lahan di sektor hutan Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia berpandangan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal melindungi hutan dan justru lebih mengarah pada mengorbankan hutan demi mengembangkan industri minyak sawit. Pandangan

masyarakat Indonesia terbentuk demikian sebab sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa deforestasi dan terancamnya hewan hewan dilindungi semakin meningkat. Tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, ada pula beberapa perusahaan pengolahan sawit yang justru berseteru dengan petani lokal, beberapa diantaranya terkait lahan plasma (Bram, 2012; Kohne, 2014; Berenschot, 2015).

Untuk meyakinkan masyarakat sipil dan internasional, Indonesia menggagas ISPO melalui Kementerian Pertanian Indonesia di tahun 2011 dengan tujuan mewujudkan pengolahan minyak sawit yang berkelanjutan di industri perkebunan sawit Indonesia, hingga mampu membuktikan pada masyarakat internasional bahwa Indonesia juga memiliki standar sertifikasi sendiri untuk memastikan bahwa industri minyak sawit di Indonesia tidak merugikan alam dan juga petani lokal.

Namun, kenyataannya pejabat Uni Eropa masih menganggap legitimasi ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) tersebut lemah, sebab belum mencakup lahan minyak sawit yang paling penting yakni APL atau Area Penggunaan Lain. Area Penggunaan Lain sendiri merupakan lahan di luar perhutanan yang penggunaannya memang diperbolehkan untuk pertanian atau permukiman. Selain itu juga kelemahannya terletak pada efektivitas system pemantauan dan juga kurang terlibatnya masyarakat sipil. Uni Eropa bahkan mendorong Indonesia untuk meninjau kembali standar sertifikasi ISPO, begitu pula terkait tanggung jawabnya untuk lebih transparan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil (Nikoloyuk, Burns, & Man, 2010).

Sebenarnya sebelum Indonesia menggagas ISPO, Indonesia pernah tergabung dalam RSPO atau *Roundtable of Sustainable Palm Oil* di tahun 2004. Dengan tergabung dalam RSPO artinya segala aktivitas perusahaan di Indonesia akan selalu dipantau terkait dengan terpenuhinya hak asasi manusia dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Namun pada tahun 2009, Indonesia memilih keluar dari RSPO sebab negara negara Eropa banyak yang melayangkan kritiknya pada Indonesia, selain itu juga Indonesia memandang bahwa pengambilan keputusan di RSPO lebih didominasi oleh masyarakat sipil. Padahal sertifikasi RSPO lebih

diakui secara global dan akan berpengaruh lebih tinggi pula pada nilai jual minyak sawit dalam lingkup internasional. Dengan tergabung dalam legitimasi RSPO juga sebenarnya akan memberikan manfaat yang lebih pada petani lokal (McCarthy, 2012).

Selain dari ISPO yang bagi Uni Eropa merupakan upaya yang masih lemah dari Indonesia untuk mempertahankan minyak sawit Indonesia di pasar internasional. Uni Eropa juga menyoroti GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Sesuai dengan namanya GAPKI merupakan asosiasi pengusaha kelapa sawit terbesar di Indonesia. Uni Eropa menyoroti GAPKI sebab asosiasi ini tegas menentang RSPO. Selain itu juga, pengambilan keputusan dalam GAPKI masih belum banyak melibatkan masyarakat sipil. Padahal masyarakat sipil dipandang sebagai pihak yang penting dalam membantu mencegah krisis ekologi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal ini juga yang membuat GAPKI dipandang belum memahami kriteria keberlanjutan yang dianut Uni Eropa dalam RED II (Kohne, 2014).

Pandangan pandangan dari Uni Eropa yang bersifat menyerang Indonesia menuai respon dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa alasan terbesar dari kritik dan penolakan Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia, yakni sebab Uni Eropa sedang melakukan upaya perlindungan terhadap komoditas minyak nabati Eropa yang berasal dari biji-bijian dan juga kaitannya dengan kesejahteraan petani bunga matahari. Pemerintah Indonesia memandang bahwa perseteruan yang dilayangkan Uni Eropa lebih mengarah pada permasalahan bisnis, bukan lingkungan.

Pemerintah Indonesia juga membela diri dengan menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia telah berkurang sebab Indonesia telah memiliki regulasi yang merujuk pada industri minyak sawit untuk mencegah dan mengurangi deforestasi. Bagi pemerintah Indonesia, hutan primer tidak bisa dalam sekejap memanfaatkan, butuh waktu yang lama untuk bisa mengubahnya menjadi lahan produksi perkebunan. Selain itu pula, dalam regulasi yang dibuat pemerintah Indonesia, perusahaan perusahaan minyak sawit tidak diperbolehkan untuk mengubah hutan konservasi

menjadi perkebunan sawit (Sugardiman, 2019).

Ironisnya, meskipun negara negara Uni Eropa sendiri telah berkomitmen untuk menolak impor minyak sawit dari Indonesia untuk tujuan *biofuel*. Mereka secara tidak langsung pun juga sebenarnya masih mengonsumsi minyak sawit Indonesia melalui produk makanan jadi yang pengolahannya menggunakan minyak sawit Indonesia sebagai salah satu bahan bakunya. Contohnya perusahaan multinasional Nestle yang memproduksi beberapa produk coklat, dan dalam pengolahannya menggunakan minyak sawit yang dibelinya dari perusahaan sawit Indonesia. Bahkan lembaga swadaya masyarakat yakni Greenpeace melakukan kampanye terhadap Nestle, sebab mereka menemukan bahwa kematian Orangutan Indonesia adalah akibat dari masyarakat Uni Eropa yang konsumtif terhadap produk coklat buatan Nestle (Greenpeace, 2007).

Di awal tahun 2022, Indonesia mulai mendapat angin segar dari Uni Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Pilet, menyatakan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak lagi mendapatkan diskriminasi di Uni Eropa. Pilet mengklaim bahwa Uni Eropa merupakan pasar yang besar bagi minyak sawit Indonesia, maka dari itu tidak ada larangan dan juga mayoritas dikenakan kebijakan non tarif barrier untuk impor minyak sawit Indonesia dan juga biodiesel. Pilet juga mengatakan bahkan saat ini impor minyak sawit Indonesia untuk Uni Eropa telah mencapai 3,4 juta ton, yang lebih banyak jika dibandingkan dengan impor negara negara dalam EFTA yang hanya sekitar 2,5 ribu ton. Adapun impor minyak sawit Indonesia untuk Uni Eropa dikatakan untuk keperluan produksi makanan, biodiesel, kosmetik, dan juga bahan baku *biofuel*. Padahal EFTA adalah negara negara yang lebih dulu positif mengimpor minyak sawit Indonesia, sekaligus merupakan negara negara yang sangat kritis mengenai isu isu lingkungan hidup (Bisnis.com, 2022).

2.2. Impor Minyak Sawit Indonesia oleh Norwegia

Menurut UN Comtrade, pada data yang sudah dikumpulkan hingga tahun 2021, Norwegia terhitung melakukan impor komoditas yang terklasifikasi dalam kategori

hewan, serta minyak dan lemak sayur sejumlah US\$362.21 ribu, dengan detail produk didalamnya termasuk dalam kategori produk minyak dan lemak sayur atau hewani diantaranya yang perlu digarisbawahi yakni biji sawit, minyak sawit, dan juga minyak sayur sebab ada produk minyak sayur yang diolah dari minyak sawit pula.

Pada tahun 2019, Norwegia tercatat mengimpor minyak sawit dari Indonesia hingga sejumlah 638.54 ribu dollar Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2021, Norwegia mengimpor minyak sayur dari Indonesia hingga sejumlah 49.61 ribu dollar Amerika Serikat (WITS, 2021).

Dari sisi Indonesia pun secara umum juga mengamini bahwa kategori minyak dan lemak sayur atau hewani termasuk ke dalam sepuluh besar komoditas ekspor Indonesia. Data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa yang menempati posisi teratas komoditas ekspor Indonesia yakni bahan bakar mineral dan minyak yang mencapai nilai hingga 20.7% dollar Amerika Serikat. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh minyak dan lemak sayur atau hewani yang bernilai 10.5% dollar Amerika Serikat. Selanjutnya yang menempati peringkat ketiga hingga kesepuluh, yakni mesin elektronik, kendaraan, besi dan baja, mutiara dan batu mulia, karet, mesin dan peralatan mekanik, pakaian yang tidak termasuk rajut, dan yang terakhir yakni alas atau pelindung kaki (Export Genius, 2019).

2.3. PT London Sumatra Tbk

PT London Sumatra Tbk. adalah salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengolah hasil panen mereka menjadi beberapa produk seperti minyak sawit salah satunya, kemudian produk mereka dibeli oleh beberapa perusahaan multinasional untuk dijadikan salah satu bahan baku produk mereka yang nantinya juga akan dipasarkan secara internasional. Beberapa perusahaan multinasional tersebut diantaranya Unilever, Nestle, Johnson & Johnson, Danone, dan juga Mondelez. Dari sini secara tidak langsung negara negara di dunia termasuk Norwegia sudah mengonsumsi minyak sawit berasal dari Indonesia.

PT London Sumatra Tbk atau LONSUM merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit Indonesia yang secara resmi sahamnya terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Secara garis besar, LONSUM melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan, dan juga pengolahan kelapa sawit. Di dalam misi nya, LONSUM secara jelas menyatakan bahwa kegiatan perindustrian mereka akan senantiasa mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. LONSUM memiliki perkebunan kelapa sawit inti seluas 93.853 hektar yang berada di beberapa pulau di Indonesia, dan 11% dari lahan perkebunan sawit tersebut masih berusia kurang dari 7 tahun. Dari perkebunan sawit tersebut, di tahun 2021 LONSUM berhasil menjual sebanyak 4,9 juta benih bibit kelapa sawit.

LONSUM sendiri didirikan pada tahun 1906 dari perusahaan perdagangan dan perkebunan asal Inggris, yang memiliki kebun pertamanya berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Saat itu LONSUM belum merambah ke perkebunan kelapa sawit, penanaman kelapa sawit baru dimulai LONSUM sekitar tahun 1980-an dan terus berkembang hingga menjadi komoditas yang penting bagi Indonesia saat ini. Pada tahun 2007, perusahaan Indofood Agri Resources Ltd. Mulai mengakuisisi dan memegang saham terbesar dari LONSUM. Sejak saat itulah, LONSUM menjadi bagian dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. hingga saat ini dan perkebunan LONSUM sudah semakin menyebar di beberapa pulau Indonesia yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Sejalan dengan kebijakan Indonesia, LONSUM juga menjalin kerja sama yang baik dengan petani plasma perkebunan kelapa sawit dan juga karet dengan total perkebunan mencapai 34.879 hektar (PT London Sumatra Indonesia Tbk., 2021).

Untuk mendukung misinya tersebut, LONSUM membentuk Kebijakan Agrikultur Berkelanjutan yang menjadi panduan atas segala kegiatan perindustrian mereka yang juga mendukung keberlanjutan. Bahkan kebijakan ini diberlakukan pula untuk petani plasma dan juga pemasok pihak ketiga yakni pihak dimana LONSUM membeli bahan baku untuk industri mereka. Adapun

komitmen utama dari Kebijakan Agrikultur Berkelanjutan yang selalu LONSUM pegang dalam memproduksi kelapa sawit yang berkelanjutan yakni larangan deforestasi, melakukan konservasi di kawasan bernilai konservasi tinggi atau KBKT dan juga area dengan stok karbon tinggi atau SKT. Selain itu LONSUM juga berkomitmen untuk tidak melakukan penanaman di area gambut dengan kedalaman berapa pun, kemudian tidak melakukan pembakaran, melaksanakan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, dan penghormatan atas hak asasi manusia termasuk diantaranya kebebasan berserikat dan tanpa diskriminasi.

LONSUM sendiri memiliki beberapa perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dimana 28 perkebunan mereka sudah tersertifikasi ISPO dan 9 pabrik mereka pula sudah tersertifikasi ISPO. Di dalam pabrik tersebut, 87% produksi minyak kelapa sawit telah tersertifikasi ISPO dan 74% produksi kernel sawit yang sudah tersertifikasi ISPO pula. Sertifikasi ISPO merupakan salah satu langkah yang yang dicapai LONSUM untuk mendukung dan menjamin kegiatan operasional kelapa sawit yang berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah Indonesia. Sesuai dengan komitmen LONSUM dalam kebijakan agrikultur berkelanjutan, sertifikasi ISPO menjadi penjamin dan pengawasan dari pemerintah atas kinerja LONSUM dalam mengelola perkebunan dan industri mereka untuk tetap tidak menghalalkan deforestasi, kemudian memperhatikan hak atas tanah, tidak melakukan penanaman baru di lahan gambut, tidak melakukan pembakaran lahan, dan beriringan tetap menjunjung hak asasi manusia para pekerja atau pihak yang terlibat di dalam kinerja LONSUM.

LONSUM berkomitmen untuk secara bertanggung jawab mempertahankan dan mewujudkan 100% perkebunan dan pabrik mereka seluruhnya sudah tersertifikasi ISPO di tahun 2023 mendatang. Bahkan sampai pihak ketiga yang memasok kebutuhan perindustrian dan juga petani kecil di lahan plasma diusahakan sudah tersertifikasi ISPO pula. Perjalanan LONSUM mencapai persen demi persen ISPO setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2013,

produksi minyak sawit LONSUM yang berhasil tersertifikasi ISPO sebanyak 16%. Kemudian tahun 2015, sertifikasi ISPO untuk produksi minyak sawitnya meningkat mencapai 56%. Tahun 2016, sertifikasi ISPO produksi minyak sawit LONSUM mencapai 79%. Di tahun 2017, meningkat mencapai 80%. Tahun 2020, mengalami peningkatan lagi mencapai 86%. Kemudian di tahun 2021, produksi minyak sawit LONSUM berhasil 100% tersertifikasi ISPO atau setara dengan 268.000 ton (PT London Sumatra Indonesia Tbk., 2021).

ISPO sendiri merupakan sertifikasi yang bersifat wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mengklaim perusahaan mereka legal dan terjamin. Standar yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan mendorong industry perkebunan yang berkelanjutan dan juga mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebagai keuntungannya, lingkungan Indonesia bisa tetap terjaga kelestariannya dan juga produk perusahaan perkebunan yang telah tersertifikasi ISPO dapat lebih dipercaya jika disaingkan di pasar global. Pemerintah Indonesia juga terus mengupayakan akreditasi internasional untuk ISPO Indonesia, dengan begitu ISPO mampu menyetarakan standarnya dengan sertifikasi berkelanjutan internasional yakni RSPO. Dalam proses sertifikasinya, ISPO melibatkan pengawas independen yang termasuk dalam komite ISPO dan juga partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar independensi, efisiensi, dan juga transparansi dapat terjaga dan terwujud dalam ISPO. Tidak hanya pihak dalam perusahaan beserta produk yang dihasilkan yang harus tersertifikasi ISPO, tetapi petani petani kecil dalam area plasma pun sudah diwajibkan meraih sertifikasi ISPO ini dalam lima tahun ke depan. Perusahaan kelapa sawit yang mengajukan sertifikasi ISPO wajib melewati proses penilaian usaha perkebunan oleh kantor perkebunan masing masing wilayah, yang kemudian perlu disetujui pula oleh pemerintah terkait audit kepatuhan ijin perkebunan, dokumentasi usaha, dan juga penilaian perkebunan.

Indonesia pula sebenarnya sudah membuat Hutan Produksi Lestari atau hutan yang memang sudah dilegalkan bagi perusahaan perusahaan yang ingin

melakukan kegiatan industri dengan mengambil bahan bahan produksi dari hutan tersebut. Segala kegiatan dalam Hutan Produksi Lestari pun sudah terpantau dan terikat dengan regulasi pemerintah. Hal yang dilakukan Indonesia dalam melakukan pemantauan yakni dengan membentuk sistem lacak balak atau *chain of custody* yang mana dengan adanya sistem ini segala kegiatan pembalakan kayu harus melewati sistem verifikasi legalitas kayu untuk menjamin kayu bulat yang berasal dari Indonesia sudah legal. Pemerintah juga memperhatikan perencanaan tata ruang hutan produksi yang tepat, waspada terhadap pelanggaran batas, kemudian kebakaran hutan, dan pengelolaan hutan yang lestari. Selain sistem lacak balak, pemerintah pun membuat sistem yang mampu memfasilitasi pengelolaan informasi yang bersifat transparan dan dapat diakses secara publik melalui jejaring internet.

Dalam upaya perlindungan lingkungan, LONSUM berkomitmen untuk secara aktif memantau titik titik api di wilayah perkebunan mereka atau hutan hutan di sekitar perkebunan mereka, pencegahan kebakaran lahan atau hutan ini pun dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah setempat. Selain itu LONSUM juga memperhatikan pengelolaan sumber daya dan juga pembuangan limbah perindustrian mereka. Segala kegiatan perindustrian yang berkaitan dengan air dan juga pembuangan limbah mengikuti regulasi dan sesuai dengan izin pemerintah Indonesia. Bahkan LONSUM mengklaim dirinya mendaur ulang atau menggunakan kembali 100% limbah penggilingan yang mereka hasilkan. Kemudian kaitannya dengan penanaman kelapa sawit yang ramah lingkungan, LONSUM memastikan bahwa perusahaannya terus melakukan riset untuk cara terefisien mengurangi penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia yang anorganik. Untuk kemudian digantikan dengan produk yang lebih alami.

Kebijakan kebijakan yang mendukung langkah produksi yang berkelanjutan tadi dibuat dan dilaksanakan LONSUM sebab mereka pun menyadari bahwa kegiatan perindustrian mereka berpeluang besar terhadap resiko perubahan iklim yang nantinya pula akan berdampak pada pola cuaca yang tidak menentu

dan juga kelangkaan air. Hal tersebut tentunya selain dapat merugikan kegiatan perindustrian mereka, juga sangat berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Bahkan yang lebih parahnya dapat mengganggu ekosistem alami baik dari flora maupun fauna di Indonesia. Hal ini memicu LONSUM untuk terus berinovasi melakukan proses perindustrian yang berkelanjutan dari hulu ke hilir, hingga selalu mengevaluasi solusi mitigasi dan adaptasi yang bisa dilakukan dalam perhatian mereka menjaga lingkungan beriringan dengan kegiatan perindustrian mereka. LONSUM juga meningkatkan penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi demi mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga terlibat dalam penelitian serta pengembangan benih kelapa sawit yang tahan terhadap cuaca ekstrem.

Sejalan dengan komitmennya tersebut, LONSUM mencatat di tahun 2020, telah berhasil mencapai penurunan konsumsi energi sebesar 1% di pabrik kelapa sawit yang sudah bersertifikat ISPO dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Begitu pula dengan emisi gas rumah kaca, di tahun 2020, LONSUM berhasil menurunkannya sebanyak 1% dari produksi olahan kepala sawit mereka dibandingkan pada tahun 2019. Untuk konsumsi air di tahun 2020 juga berhasil mengalami penurunan sehingga lebih efisien yakni 5% dari tahun sebelumnya. LONSUM juga menggunakan 98% bahan bakar dari produk yang terbarukan untuk pengolahan kelapa sawit mereka. Tim ahli kebakaran LONSUM juga secara rutin menjalani pelatihan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta aparat kepolisian setempat dan juga pemerintah daerah. Tidak terlewat pula peran masyarakat sekitar, dimana LONSUM melibatkan 32 desa di sekitar perkebunan mereka dalam upaya pencegahan kebakaran hutan atau lahan untuk tujuan pembukaan lahan atau penanaman kembali, yang sudah dilakukan sejak tahun 2017. LONSUM juga memastikan sejak tahun 2013, sudah tidak ada lagi penanaman baru atau pembukaan lahan di kawasan hutan gambut, serta control penuh terus dilakukan dalam menjaga ketinggian permukaan air di

lahan gambut. Lebih lanjut, LONSUM memastikan bahwa tidak ada hutan primer yang terkena dampak selama perusahaannya melakukan penanaman baru ataupun penanaman kembali di tahun 2020. Penggunaan pupuk organik 100% juga dipastikan di tahun yang sama. Pengelolaan hama juga dilakukan demi mengurangi penggunaan pestisida kimia, hingga di tahun 2020 LONSUM berhasil menurunkan 5% penggunaan pestisida dibandingkan tahun 2019. Sebanyak 67% limbah tidak berbahaya juga berhasil didaur ulang dengan baik.

Terkait dengan penanaman berkelanjutan, LONSUM memiliki kebijakan perkebunan berkelanjutan yang menaruh perhatian tinggi pada Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan juga area Stok Karbon Tinggi. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi sendiri meliputi area sungai, lahan asli, dan juga habitat untuk spesies yang terancam punah. Perhatian ditunjukkan dengan cara mengidentifikasi lahan mana yang cocok dan legal untuk dilakukan penanaman dan lahan mana yang harus dijaga agar tidak disentuh untuk keperluan konservasi. LONSUM telah mengidentifikasi 11.776 hektar dari total lahan yang dimiliki perusahaan mereka, sebagai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi. LONSUM juga telah memiliki rencana pengelolaan untuk kawasan bernilai konservasi tinggi tersebut dengan tujuan memonitor keamanan dan menjamin tidak adanya gangguan yang terjadi di dalamnya. Lebih lanjut, LONSUM juga telah membentuk rencana rehabilitasi di kawasan bernilai konservasi tinggi untuk menjaga bahkan meningkatkan biodiversitas dan juga penghijauan secara menyeluruh. Secara beriringan, LONSUM melakukan identifikasi terhadap spesies yang dilindungi di area kawasan bernilai konservasi tinggi mereka dan juga sekitarnya. Sebagai pendukung, LONSUM menerapkan kebijakan tanpa toleransi atas percobaan atau kegiatan perburuan, perusakan atau penebangan hutan, dan juga pembakaran spesies atau margasatwa liar yang dilindungi. Upaya monitor

segala kondisi spesies tumbuhan maupun satwa dilakukan tim konservasi LONSUM dengan dukungan kerja sama dari universitas di setiap wilayah konservasi mereka. Untuk lahan seluas 940 hektar yang digunakan untuk penanaman kembali bahkan dimonitor dengan menggunakan teknologi modern yakni *drone*.

Terkait dengan emisi gas rumah kaca, gas terbesar yang dihasilkan oleh LONSUM yakni metan yang bersumber dari limbah cair pengolahan kelapa sawit, penggunaan bahan bakar untuk pabrik dan juga alat transportasi, kemudian penggunaan bahan kimia di pabrik dan juga perkebunan, disusul dengan emisi nitrous oksida yang dihasilkan dari penggunaan pupuk. LONSUM menyadari akan aktivitas mereka yang mengeluarkan emisi gas gas tersebut dan melakukan upaya pengurangan emisi, hingga total emisi mulai dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit mereka mengalami penurunan sebanyak 1% dari tahun 2019, yang semula berjumlah 426.373 ton CO₂ menjadi 359.988 ton CO₂ di tahun 2020. Sebab penurunan ini berasal dari kesadaran LONSUM yang kemudian mengalihkan konsumsi bahan bakar mereka di enam pabrik yang semulanya menggunakan generator diesel, berubah menjadi listrik. LONSUM juga menggunakan alat kompos yang mampu mengurangi emisi metana hingga 70% dari alat pembuatan kompos pada umumnya, yakni *aerated bunker composters* yang sudah dioperasikan sebanyak tiga buah, dan akan dilakukan rencana pengadaan secara menyeluruh di setiap pabrik pabrik mereka (PT London Sumatra Indonesia Tbk., 2020).

Untuk laporan kinerja LONSUM di tahun 2021, ada beberapa yang aspek yang mengalami peningkatan dan juga penurunan. LONSUM berhasil mengurangi sebanyak 3% konsumsi energi di pabrik kelapa sawit mereka dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian untuk emisi gas rumah kaca yang berhasil diturunkan mengalami peningkatan yakni 9% per ton produk

kelapa sawit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebab LONSUM telah menerapkan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, dimana lima pabrik mereka telah beralih dari generator diesel ke penggunaan listrik. LONSUM juga berhasil mengurangi 4% konsumsi air untuk keperluan penyulingan. Untuk memperkuat prosedur mitigasi kebakaran, tim kebakaran LONSUM telah mengikuti 9 hari pelatihan mengenai pengendalian kebakaran di 12 wilayah perkebunan mereka. Upaya pengawasan dan pencegahan kebakaran juga melibatkan 37 desa di sekitar perkebunan dan pabrik LONSUM. LONSUM menjamin 100% kepatuhannya atas kebijakan deforestasi dan nihil kerusakan hutan primer. Penggunaan 100% pupuk organik juga tetap dijaga konsistensinya di tahun 2021 ini. Hanya saja penggunaan pestisida di tahun 2021 meningkat menjadi 7% dibanding tahun 2020. Hal ini disebabkan LONSUM melakukan peningkatan pengendalian gulma sebagai akibat dari musim hujan yang berkepanjangan serta harus melakukan penanaman kembali. Kemudian untuk total emisi yang dikeluarkan dari kegiatan perkebunan dan juga pabrik di tahun 2021 berhasil turun sebanyak 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (PT London Sumatra Indonesia Tbk., 2021).

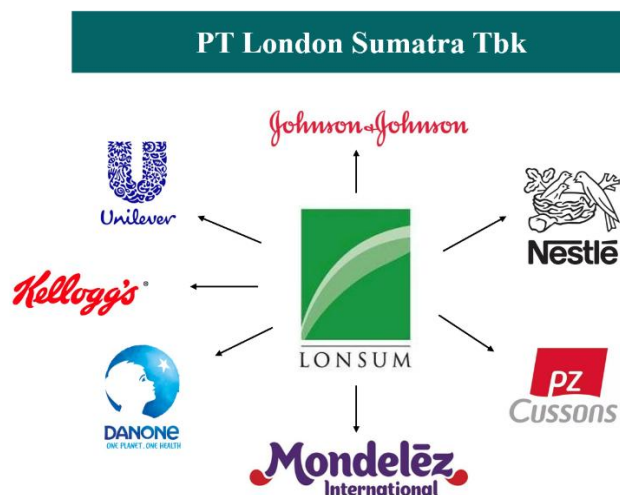
LONSUM juga memperhatikan petani petani lokal yang terdampak akibat dari penggunaan lahan untuk perindustrian mereka. Bentuk perhatian ini diberikan pada petani petani lokal yang sebelumnya memiliki lahan pertanian, atau mencari nafkah dari lahan yang saat ini sudah digunakan LONSUM. Umumnya petani petani lokal tersebut juga bermukim di sekitar lahan perkebunan. LONSUM memberikan minimal 20 persen dari total luas lahan mereka, untuk petani lokal bercocok tanam dan mencari penghasilan dari perkebunan tersebut. Lahan ini disebut dengan lahan plasma. Tanggung jawab dan perhatian LONSUM ini sesuai dengan kebijakan domestik Indonesia sendiri yakni Permentan nomor 26 Tahun 2007, tercantum bahwa

perusahaan perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat minimal seluas 20% dari total luas perkebunan yang dimiliki perusahaan. Kebijakan ini juga masih dianut hingga saat ini dan tercantum dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di pasal 58 dengan inti yang sama.

Sejak tahun 2010 pun, LONSUM sudah memberikan seluas 554 hektare lahan perkebunan mereka untuk pola kemitraan plasma dengan masyarakat sekitar. Hasil panen dari lahan plasma tersebut, pada saat itu dibagi menjadi 70% untuk petani lokal dan 30% untuk perusahaan. Kepedulian LONSUM dengan lingkungan dan masyarakat sekitar pun digambarkan secara singkat dari slogan yang mereka yakini yaitu 3P atau *planet*, *people*, dan *profit*. Kegiatan perkebunan di lahan plasma pun tetap dikawal oleh perusahaan agar terjamin keberlanjutan dalam setiap prosesnya selaras pula dengan LONSUM yang mengupayakan petani lokal di lahan plasma dapat tersertifikasi ISPO pula. Tidak hanya sampai di situ, penjualan hasil panen juga direncanakan untuk melibatkan koperasi kampung. Dengan harapan kebermanfaatan juga dapat dirasakan masyarakat lainnya walau tidak bekerja sebagai petani plasma secara langsung (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2010).

2.4. Konsumsi Norwegia atas Produk Berbahan Baku Minyak Sawit Indonesia

Selain Norwegia secara langsung mengimpor minyak sawit atau biji sawit, kemudian juga mengimpor makanan Indonesia yang bahan bakunya mengandung sawit. Norwegia juga secara tidak langsung sudah mengonsumsi produk sawit dari Indonesia. Hal ini disebabkan ada beberapa perusahaan produsen multinasional yang membeli olahan sawit Indonesia sebagai bahan baku produk mereka. Produk produk konsumsi dunia tersebut diantaranya sesuai dengan ilustrasi gambar 2.4.1. berikut yakni Kellogg's, Unilever, Johnson & Johnson, Nestle, PZ Cussons, Danone, dan Modelez.



Gambar 2.4. 1 Perusahaan Internasional Pembeli Kelapa Sawit Indonesia

*Sumber: diolah kembali oleh penulis
dari BBC Indonesia (2022)*

Perusahaan multinasional tadi memasok sebagian bahan baku mereka yang berasal dari sawit dari PT London Sumatra Tbk, yang mana induk perusahaannya yakni Indofood Agri Resources, yang memiliki sekitar 250.000 hektare perkebunan sawit di Indonesia. Setelah minyak sawit dipasok dari PT London Sumatra Tbk, perusahaan perusahaan multinasional tadi menggunakan minyak sawit tersebut sebagai salah satu bahan baku untuk memproduksi kebutuhan sehari-hari yang sudah sangat dikenal masyarakat internasional sekalipun, seperti sabun bayi *Cussons*, kemudian kukis *Oreo*, *Ritz*, hingga cokelat *Cadbury*, dan masih banyak juga produk lainnya. Selain dari PT London Sumatra, diketahui bahwa Reckitt Benckiser, Unilever, Danone, dan Mondelez, dengan rentang tahun dari 2018 hingga 2020, juga pernah membeli minyak sawit sebagai bahan baku mereka dari PT Palmdale Agroasia Lestari, yang sebelumnya didistribusikan dahulu ke PT Pundi Lahan Khatulistiwa (BBC Indonesia, 2022).